

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID -19 DI PUSKESMAS KEDUNGORO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA

Ruliani Siregar

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
ruliani.18009@mhs.unesa.ac.id

Indah Prabawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan vaksinasi covid-19 sebagai upaya mengatasi permasalahan covid-19. Puskesmas Kedungoro merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang berada di pusat kota dengan tingkat mobilitas masyarakat yang padat. Dengan kepadatan mobilitas diperlukan kekebalan imunitas kelompok untuk mengatasi penyebaran virus covid-19 dengan melakukan vaksinasi covid-19. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kedungoro sebagai upaya perlindungan diri dari virus covid-19 dengan menggunakan indikator *content of policy* dan *context of policy*. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan indikator *content of policy* yaitu manfaat adanya kebijakan vaksinasi mampu menurunkan kasus pasien positif dan meninggal akibat covid-19 di Puskesmas Kedungoro. Hal ini juga didorong dengan peran pelaksana program yang baik dan sumber daya yang sudah tercukupi. Kendala yang ditemui yaitu tingkat kepatuhan masyarakat masih kurang karena takut terhadap jarum suntik, ketakutan penderita komorbid, dan keraguan akan efektivitas vaksin akibat dari penyebaran berita *hoax*. Sedangkan dalam indikator *context of policy*, strategi yang digunakan yaitu sosialisasi, pembuatan grup *whatsApp*, *door to door* dan monitoring vaksinasi dilakukan melalui aplikasi *Pcare* dan *smile*. Proses vaksinasi yang dilakukan Puskesmas Kedungoro sudah sesuai dengan petunjuk teknis, namun hanya saja kurangnya persiapan dalam pelaksanaannya. Saran peneliti yaitu puskesmas melakukan sosialisasi rutin lebih mendalam dengan menjelaskan isi kebijakan yang mengatur vaksinasi untuk meyakinkan masyarakat terkait pentingnya vaksinasi covid-19 disertai dengan melakukan pengawasan penyebaran berita *hoax*.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Vaksinasi, Covid-19

Abstract

The Indonesian government issued a COVID-19 vaccination policy as an effort to overcome the Covid-19 problem. The Kedungoro Health Center is one of the health facilities located in the city center with a dense level of community mobility. With the density of mobility, group immunity is needed to overcome the spread of the Covid-19 virus by vaccinating against Covid-19. The purpose of this study is to describe the implementation of the Covid-19 Vaccination Policy at the Kedungoro Health Center as an effort to protect themselves from the covid-19 virus by using indicators content of policy and context of policy. The research method used is a qualitative approach research method with descriptive research type. Data collection techniques used are participant observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study were based on indicators of content of policy, namely the benefits of a vaccination policy being able to reduce cases of positive patients and deaths due to COVID-19 at the Kedungoro Health Center. This is also driven by the role of good program implementers and sufficient resources. The obstacles encountered were the level of community compliance was still lacking due to fear of needles, fear of comorbid patients, and doubts about the effectiveness of vaccines due to the spread of news hoax. Meanwhile, in indicators context of policy, the strategies used are socialization, creating groups WhatsApp, door to door and vaccination monitoring through applications Pcare and Smile. The vaccination process carried out by the Kedungoro Health Center was in accordance with technical instructions, but there was a lack of preparation in its implementation. The researcher's suggestion is that the puskesmas carry out routine socialization more deeply by explaining the contents of policies that regulate vaccination to convince the public regarding the importance of covid-19 vaccination accompanied by monitoring the spread of news hoax.

Keywords: Policy Implementation, Vaccination, Covid-19.

PENDAHULUAN

Virus covid-19 atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan virus yang menyerang pada sistem pernafasan. Penyebaran virus covid-19 di Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2021 mencapai angka 4.237.834 terkonfirmasi dan 4.079.120 dinyatakan sembuh. Pelonjakan kasus covid-19 di Indonesia yang terus meningkat menuntut Pemerintah untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah pusat juga telah mengambil tindakan sepihak terhadap penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan karena Covid-19 dinyatakan sebagai ancaman dunia dengan status darurat global, yang artinya pemerintah harus tanggap terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan serius (Purba et al., 2021). Segala cara telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan covid-19. Selain melakukan prosedur perawatan kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, tentunya juga harus menjaga imunitas atau daya tahan tubuh. Dimana pada kondisi pandemi covid-19 ini daya tahan tubuh menjadi salah satu senjata yang dimiliki oleh manusia untuk bertahan dan menghindari penyebaran virus covid-19. Meningkatkan imunitas untuk menghindari virus covid-19 dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan melakukan vaksinasi covid-19. Vaksin covid-19 dapat menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun. Mengembangkan vaksin covid-19 yang aman dan efektif merupakan langkah penting dalam upaya penyelamatan global untuk mengakhiri pandemi covid-19. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal (Unicef, 2021).

Vaksin adalah produk biologi yang mengandung antigen berupa toksoid atau mikroorganisme protein rekombinan yang bila ditambahkan ke zat lain bersifat spesifik aktif untuk penyakit tertentu bila diberikan kepada seseorang. Sedangkan vaksinasi adalah pemberian vaksin yang secara khusus diberikan secara aktif untuk menciptakan atau meningkatkan kekebalan terhadap penyakit. Hal ini memastikan bahwa jika seseorang terkena suatu penyakit suatu hari nanti, penderita hanya mengalami sakit ringan. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, 2021).

Kebijakan vaksinasi covid-19 telah tersedia di Indonesia dan mulai diimplementasikan pada tanggal 13 Januari 2021 dimana vaksinasi pertama diberikan kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan dilanjutkan oleh para tenaga medis, pejabat negara

lainnya hingga masyarakat Indonesia (Satuan Tugas Penanganan Covid, 2021). Kebijakan Vaksinasi Covid-19 ini merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melalui Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Jenis vaksin yang diberikan harus mendapatkan *Emergency Use of Authorization* (EUA) atau persetujuan penggunaan dalam kondisi emergensi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga menetapkan jenis dan kriteria vaksin yang digunakan. Jenis vaksin yang dapat digunakan untuk vaksinasi covid-19 di Indonesia yaitu yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Life Sciences Co., Ltd (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Vaksin Covid-19 telah menunjukkan hasil imunogenik yang menjanjikan dalam uji klinis. Hasil ini didasarkan pada tingkat perlindungan dan profil keamanan yang dapat diterima. dari hasil studi referensi Vaksin PfizerBioNTech memiliki skor efikasi dan keamanan 94,6% dan merupakan vaksin yang tidak menimbulkan efek samping yang serius (Nugroho & Hidayat, 2021).

Pemerintah terus berupaya untuk mencukupi kebutuhan vaksin untuk masyarakat. Hingga saat ini, total vaksin yang diterima oleh Pemerintah Indonesia mencapai 285,3 Juta per 21 Oktober 2021 (Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Berikut merupakan update data jumlah masyarakat terpapar covid-19 dan data vaksinasi covid-19 di Indonesia.

Tabel 1. Tabel Jumlah Penduduk Terpapar Covid-19 dan Data Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Update 21 Oktober 2021

Jumlah Penduduk Terpapar Covid-19 di Indonesia Update 21 Oktober 2021		
Konfirmasi 4.237.834	Sembuh 4.079.120	Meninggal 143.120
Data Vaksinasi Covid-19 Update 21 Oktober 2021		
Target Sasaran Vaksinasi Nasional 208.265.720		
Vaksinasi Dosis 1 110.406.777	Vaksinasi Dosis 2 65.173.148	Vaksinasi Dosis 3 1.084.605

Sumber: covid19.go.id (*data diolah)

Menurut Junaedi et al., (2021), efektivitas vaksinasi Covid-19 di Indonesia menyatakan bahwa kebijakan pemberlakuan vaksinasi terutama vaksin dosis ke-2 berdampak signifikan dengan peningkatan kasus pasien covid-19, kematian, hingga kesembuhan pasien. Dampak kesembuhan pasien lebih tinggi daripada dampak kasus positif dan kematian. Namun, dalam pengimplementasian vaksinasi covid-19 masih ditemukan beberapa kendala seperti keengganan masyarakat untuk melakukan vaksin, sinkronisasi data yang kurang, dan sebagainya (Asyafin et al., 2021). Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat. Munculnya banyak sumber berita khususnya berita *hoax* yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat Indonesia terhadap vaksinasi. Persepsi negatif yang dialami masyarakat dapat menyebabkan terjadinya rasa kecemasan. Sumber kekhawatiran masyarakat yaitu tentang keamanan, kemanjuran, efek samping, kesalahpahaman kebutuhan vaksin, kurangnya kepercayaan pada sistem layanan kesehatan, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat penyakit covid-19 dapat dicegah dengan vaksin (Putri et al., 2021).

Keragu-raguan masyarakat atas dasar kecemasan disebabkan karena kurangnya informasi yang jelas dan memadai. Pemerintah dapat mengatasi permasalahan ini dengan melakukan kolaborasi upaya pemerintah, pembuat kebijakan kesehatan (vaksinasi), dan sumber media yang dipercaya sebagai komunikasi kesehatan yang kredibel untuk membangun *public trust* terhadap vaksinasi covid-19 dengan melakukan penyebaran berita yang tepat waktu, konsisten, jelas, aman, dan dapat dipercaya (Astuti et al., 2021). Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan vaksinasi, keberhasilan kebijakan vaksinasi covid-19 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dimulai dengan membangun kepercayaan rakyat, serta juga melibatkan partisipasi masyarakat, kepastian hukum, transparansi, tanggungjawab keadilan, efektif, dan efisien (Djayaputra, 2021).

Pelayanan vaksinasi Covid-19 diberikan di fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, maupun milik pemerintah/swasta yang memenuhi persyaratan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Klinik, Rumah Sakit, dan/atau Sarana Kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, 2021). Salah satu puskesmas yang memberikan pelayanan vaksinasi covid-19 adalah Puskesmas Kedungdoro.

Puskesmas Kedungdoro merupakan layanan kesehatan yang berada dipusat Kota Surabaya tepatnya di Jalan Kaliasin Pempa 79-81 Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari. Wilayah kerja dari Puskesmas Kedungdoro ini meliputi dua kelurahan yaitu Kelurahan Kedungdoro dan Kelurahan Tegalsari. Puskesmas Kedungdoro memiliki lokasi yang strategis karena selain berlokasi di pusat kota, juga berlokasi pada pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, mall, dan layanan publik. Dengan begitu tingkat mobilitas di lingkungan Puskesmas Kedungdoro menjadi padat. Menurut Profil Puskesmas Kedungdoro, jumlah penduduk dipuskesmas Kedungdoro pada tahun 2021 yaitu sebanyak 22.816 jiwa di Kelurahan Kedungdoro dan 18.051 jiwa di Kelurahan Tegalsari. Dengan padatnya tingkat mobilitas masyarakat di lingkungan Puskesmas Kedungdoro, tentu akan berdampak pada penyebaran virus covid-19. Dengan begitu penilaian terhadap implementasi kebijakan vaksinasi covid -19 akan terlihat.

Proses pelayanan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Sesuai dengan peraturan tersebut, Puskesmas Kedungdoro telah melakukan vaksinasi kepada kelompok prioritas yaitu tenaga kesehatan puskesmas dan memberikan layanan vaksinasi massal untuk lansia pada tanggal 23 dan 24 Februari 2021 dan hingga saat ini, vaksinasi covid-19 telah diberikan pada masyarakat umum diatas 18 tahun. Puskesmas Kedungdoro memberikan pelayanan vaksinasi covid-19 baik dosis 1 maupun dosis 2. Jenis vaksin yang digunakan yaitu jenis Sinovac, Astra Zeneca, dan Moderna, dimana jenis vaksin moderna diperuntukan untuk tenaga kesehatan Puskesmas Kedungdoro. Dalam pelaksanaannya, Puskesmas Kedungdoro juga bekerjasama dengan lintas sektor. Vaksinasi dilakukan didalam Puskesmas dan diluar Puskesmas. Jika diluar Puskesmas, pelaksanaan vaksinasi covid-19 memanfaatkan gedung serbaguna milik Kelurahan, Balai RW, dan tempat lainnya sesuai dengan jumlah masyarakat yang melakukan vaksinasi. Selain itu, Puskesmas Kedungdoro juga melakukan giat vaksin yang bekerjasama dengan pihak RT dan RW. Maksudnya yaitu pihak RW/RT mengajukan kepada Puskesmas Kedungdoro untuk menyelenggarakan vaksinasi di daerah RT/RW tersebut. Data masyarakat Puskesmas Kedungdoro yang sudah menerima vaksin pada tanggal 19 September 2021 yaitu mencapai 26.707 jiwa. Berikut tabel data masyarakat Puskesmas Kedungdoro yang telah menerima vaksin.

Tabel 2. Tabel Data Penduduk Penerima Vaksin Tanggal 19 September 2021

VAKSIN SINO VAC	VAKSIN AZTRA ZENECA
Dosis 1: 14.147	Dosis 1: 1.654
Dosis 2: 10.002	Dosis 2 :904

Sumber: Puskesmas Kedungdoro

Dalam pelaksanaannya, pemberian vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro memiliki kendala-kendala. Kendala yang dialami yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksin covid-19 sehingga terjadi peningkatan kasus pasien positif. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai banyak masyarakat yang mulai mau divaksin. Salah satu faktor terjadinya peningkatan minat vaksinasi covid-19 masyarakat yaitu dengan adanya ancaman. Ancaman ini berupa desakan untuk melakukan vaksinasi dikarenakan untuk menggunakan layanan pemerintah syarat utama yang harus dimiliki yaitu telah melakukan vaksin dibuktikan dengan sertifikat vaksin (Dahlan, 2021). Selain layanan pemerintah, beberapa mall juga menerapkan syarat penunjukan sertifikat vaksin melalui aplikasi peduli lindungi sebelum memasuki kawasan mall. Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, Puskesmas Kedungdoro telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi covid-19.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan mengenai implementasi kebijakan vaksinasi, kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro, yaitu tingkat kepatuhan sasaran kebijakan yaitu penduduk Puskesmas Kedungdoro dalam menerima vaksin covid-19 sangat rendah, maka peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 ini. Dengan begitu peneliti mengambil judul "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya". Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya?.

Kebijakan publik menurut Friedrich dalam Agustino (2008:7), yaitu Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam situasi tertentu dimana kebijakan yang diusulkan memiliki hambatan (kesulitan) dan metode (peluang) yang berguna dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan. Dengan demikian, kebijakan publik memiliki hubungan dengan pemecahan masalah yang konsisten dengan tujuannya. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:139), Implementasi kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh individu atau pejabat, atau

pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Kesuksesan implementasi kebijakan menurut Marilee S. Grindle dalam Agustino (2008:154-157) ditentukan oleh tingkat implementability yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of policy* (lingkungan kebijakan). Pengukuran implementasi kebijakan melalui *content of policy* (isi kebijakan) mencakup beberapa indikator seperti:

- 1) Kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu pelaksanaan kebijakan. Indikator ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pasti melibatkan beberapa kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan itu membawa pengaruh terhadap pelaksanaannya.
- 2) Tipe manfaat, indikator ini menjelaskan bahwa kebijakan harus memiliki beberapa manfaat, yang menunjukkan dampak positif dari penerapan kebijakan tersebut.
- 3) Derajat perubahan yang ingin dicapai, maksud dari indikator ini adalah untuk menjelaskan besarnya perubahan/tujuan yang dicapai dari implementasikan kebijakan tersebut
- 4) Letak pengambilan keputusan, pengambilan keputusan kebijakan memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pada indikator ini perlu menjelaskan dimana pengambilan keputusan atas kebijakan yang diimplementasikan.
- 5) Pelaksana Program, pada indikator ini menjelaskan tentang pelaksana kebijakan yang kompeten guna mencapai keberhasilan dari suatu kebijakan.
- 6) Sumber daya yang digunakan, keberhasilan suatu kebijakan tentunya didukung oleh sumber daya agar proses pengimplementasian berjalan dengan baik.

Dan dalam pengukuran *context of policy* mencakup indikator seperti:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, indikator ini perlu mempertimbangkan kekuatan, kekuasaan, kepentingan, dan strategi para pihak yang terlibat dalam rangka memperlancar implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, berkaitan dengan kondisi lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan.
- 3) Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana, berkaitan dengan sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dengan adanya kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dalam meningkatkan

imunitas tubuh sebagai upaya perlindungan diri dari penyebaran virus covid-19. Manfaat yang diperoleh dari penulisan artikel ini yaitu sebagai bahan masukan kepada Pemerintah dan khususnya pada Puskesmas Kedungdoro dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi covid-19. Selain itu juga dapat dijadikan referensi bahan bacaan atau referensi jurnal untuk masyarakat sehingga mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi covid-19 dalam menekan angka kasus positif covid-19.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Puskesmas Kedungdoro yang berada di Jalan Kaliasin Pompa 79-81 RT.12 RW.11 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interview atau wawancara mendalam, observasi partisipan dan dokumentasi. Metode penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi merupakan cara atau teknik dari proses pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013:241). Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dipublikasikan dan data primer diperoleh dari subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Subjek dalam penelitian ini yaitu Dr. Dayanti dan Ibu Nia selaku tenaga kesehatan Puskesmas Kedungdoro dan beberapa masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi maupun yang belum melaksanakan vaksinasi diantaranya yaitu Bapak Agus, Bapak Yoyok, Bapak Sunaryo, Ibu Ulfa, Bapak Aswan, Ibu Dian, Ibu Neni, Ibu Dewi, dan beberapa masyarakat lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data menurut Miles and Huberman dan aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan implementasi kebijakan vaksinasi di Puskesmas Kedungdoro dengan teori implementasi kebijakan menurut teori Merilee S. Grindle yaitu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of policy*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Grindle untuk melihat keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur melalui indikator isi kebijakan dan lingkungan kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut analisis Implementasi Kebijakan

Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dalam upaya mengatasi penyebaran virus covid-19.

A. *Content of policy* (isi kebijakan)

Dalam mengukur keberhasilan kebijakan terdapat 6 indikator, yaitu:

1) **Kepentingan yang mempengaruhi**

Kepentingan yang mempengaruhi dalam pengimplementasian kebijakan melibatkan kepentingan dari aktor, dan sejauh mana kepentingan itu mempengaruhi implementasi kebijakan. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro yaitu Presiden dan Kementerian Kesehatan selaku pembuat kebijakan, dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan tenaga kesehatan Puskesmas Kedungdoro yang menjalankan secara teknis isi kebijakan yang terdiri dari dokter umum, bidan, dan perawat yang bertugas untuk memberikan layanan vaksinasi. Dalam pelaksanaannya Puskesmas Kedungdoro dibantu kader kesehatan, pendekar biru, dan lintas sektor seperti pihak RT/RW, kelurahan, kecamatan, polisi dan tentara.

Puskesmas Kedungdoro dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 melakukan segala tugas apapun yang diberikan oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota selaku pembuat kebijakan. Puskesmas Kedungdoro dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 berpedoman dari peraturan-peraturan yaitu petunjuk teknis yang dibuat oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 meliputi perencanaan kebutuhan, sasaran vaksinasi, pendanaan, distribusi dan manajemen vaksin dan logistik, pelaksanaan pelayanan, kerja sama, pencatatan dan pelaporan, strategi komunikasi, penentuan, penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi covid-19, serta monitoring dan evaluasi. Kepentingan Puskesmas Kedungdoro dalam menjalankan vaksinasi covid-19 hanya fokus sebagai tempat layanan kesehatan guna memberikan pelayanan vaksinasi bagi masyarakat untuk mengurangi kasus pasien positif covid-19 khususnya dilingkungan Puskesmas Kedungdoro, yaitu lingkup Kelurahan Kedungdoro dan Kelurahan Tegalsari. Berikut hasil wawancara peneliti dengan dr. Dayanti selaku tenaga medis Puskesmas Kedungdoro dengan adanya kebijakan

vaksinasi covid-19 dalam upaya menanggulangi penyebaran virus covid-19.

“Ya kalau kami petugas Puskesmas Kedunggoro terutama kan dibawah Pemerintah Kota Surabaya ya, melakukan tugas apapun yang diberikan oleh Pemerintah. Jadi selama ada perintah harus melaksanakan vaksin misalnya sasaran pertama nakes ya kita lakukan ke nakes, sasaran kedua lansia ya kita lakukan ke lansia sesuai dengan wilayah kerja di Puskesmas Kedunggoro” (wawancara pada tanggal 29 November 2021).

Proses pelaksanaan vaksinasi covid-19 Puskesmas Kedunggoro dimulai dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi covid-19 melalui sosialisasi, *door to door* kerumah masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mulai paham dan mau melakukan vaksinasi covid-19. Dengan begitu dalam penerapannya tidak ada unsur paksaan kepada masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi.

Proses pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedunggoro dilakukan dengan membuat sebuah data berupa daftar sasaran (masyarakat) vaksinasi. Data ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat yang belum maupun sudah menerima vaksin, baik itu dosis 1 dan dosis 2. Data ini digunakan oleh Puskesmas Kedunggoro sebagai laporan hasil jumlah masyarakat yang kemudian disetorkan diweb vaksinasi covid-19 yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mengontrol sasaran vaksinasi covid-19.

Pengolahan data sasaran/masyarakat vaksinasi covid-19, Puskesmas Kedunggoro bekerjasama dengan RT/RW dan masing-masing Kelurahan untuk mengecek data nama sasaran/masyarakat. Data ini *diupgrade* setiap hari dan data masyarakat yang sudah divaksin bisa disetorkan diaplikasi vaksinasi covid-19 milik pemerintah. Data ini berisikan nama warga dan alamat warga apakah warga tersebut berdomisili dilingkungan Puskesmas Kedunggoro atau tidak. Dalam pelaksanaannya juga ditemui beberapa kendala data seperti adanya warga yang ber-KTP tempat tinggal dilingkungan Puskesmas Kedunggoro, namun ternyata warga tersebut tidak tinggal disini. Dengan begitu untuk penyelesaian kendala data ini dilakukan dengan melakukan verifikasi dengan RT/RW setempat. Sehingga dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 pihak RT/RW dan Kelurahan memiliki peranan dalam

sinkronisasi data sasaran vaksinasi antara masyarakat yang sudah maupun yang belum divaksin.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh negatif dari kepentingan aktor yang terlibat di Puskesmas Kedunggoro. Proses implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedunggoro hanya difokuskan untuk memberikan layanan kesehatan khususnya layanan vaksinasi covid-19. Sehingga kapasitas Puskesmas hanya menjalankan tugas atau perintah dari Pemerintah Pusat melalui peraturan yang dibuat.

2) Tipe manfaat

Manfaat adanya kebijakan vaksinasi covid-19 yaitu memberikan perlindungan pada tubuh agar tidak mudah terserang atau sakit akibat covid-19 dengan menstimulasi kekebalan tubuh manusia. Dengan begitu apabila seorang pasien terpapar virus covid-19, efek yang ditimbulkan tidak terlalu berat. Hal ini tentu juga akan membantu dalam menekan tingkat kasus kematian covid-19.

Penerapan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedunggoro sendiri memiliki manfaat yang baik yaitu menurunnya kasus pasien positif covid-19. Hingga saat ini (Desember 2021) tidak ada kasus pasien positif covid-19 di Puskesmas Kedunggoro. Manfaat lain juga dirasakan oleh Bu. Nia selaku tenaga kesehatan Puskesmas Kedunggoro. Manfaat yang dirasakan yaitu dengan adanya kebijakan vaksinasi covid-19 ini bermanfaat menurunkan kasus pasien positif-19 di Puskesmas Kedunggoro, sehingga Puskesmas tidak hanya fokus dengan pasien positif, namun bisa mengoptimalkan layanan kesehatan yang lain. Berikut adalah data tabel kasus penduduk/pasien positif covid-19 di Puskesmas Kedunggoro.

Tabel 3. Data Penduduk Positif Covid-19 di Puskesmas Kedunggoro Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Kasus
1.	Januari	86
2.	Februari	99
3.	Maret	32
4.	April	4
5.	Mei	14
6.	Juni	134
7.	Juli	148
8.	Agustus	123
9.	September	16
10.	Oktober	9

Sumber: Puskesmas Kedunggoro

Dari tabel diatas, dapat diketahui penyebaran virus covid-19 dilingkungan Puskesmas Kedungdoro mulai meningkat semenjak adanya gelombang kedua covid-19. Penyebaran covid-19 mulai meningkat pada bulan Juni 2021 dan mengalami peningkatan tinggi pada bulan Juli dan mulai kembali menurun dibulan September. Dan hingga saat ini kasus pasien positif di Puskesmas Kedungdoro sudah tidak ada. Tentunya hal ini juga dipengaruhi dengan mulai aktifnya masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi covid-19.

Selain itu, manfaat vaksinasi covid-19 juga dirasakan oleh masyarakat Puskesmas Kedungdoro. Manfaat yang dirasakan yaitu dengan adanya vaksinasi ini masyarakat sedikit tidak merasa was-was dengan penyebaran virus covid-19. Hal ini disampaikan oleh Pak. Agus selaku masyarakat yang tinggal di wilayah Puskesmas Kedungdoro pada saat wawancara dengan peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan vaksinasi covid-19 ini bermanfaat baik bagi masyarakat, tenaga kesehatan Puskesmas Kedungdoro, dan Pemerintah. Dampak positif yang dirasakan selama berjalannya vaksinasi covid-19 yaitu menurunnya kasus pasien positif covid-19 di lingkungan Puskesmas Kedungdoro sehingga masyarakat tidak khawatir dan Puskesmas Kedungdoro bisa mengoptimalkan layanan kesehatan lainnya.

3) Derajat perubahan yang diinginkan

Perubahan yang diinginkan dengan adanya vaksinasi covid-19 yaitu untuk mengatasi penularan virus melalui kekebalan tubuh dan menurunkan angka kematian dan melindungi masyarakat dari virus covid-19 agar tetap bisa produktif melakukan kegiatan sehingga mengurangi dampak negatif khususnya dibidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 yang dijadikan sebagai opsi pemecahan masalah covid-19 sendiri tidak 100% bisa menghindari penyebaran virus, namun bisa meminimalisir dampak buruk yang terjadi. Target ketercapaian sasaran/masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19 di Indonesia yaitu 70% dari populasi untuk penerima vaksin dosis pertama. Pemerintah berharap target ini dapat tercapai pada akhir bulan Desember 2021. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, per November 2021 vaksinasi covid-19 di Indonesia sudah mencapai 40% (kategori lengkap), dan 60% (dosis pertama).

Sasaran penduduk Puskesmas Kedungdoro berjumlah 34.527 jiwa yang terdiri dari 19.448 jiwa dari Kelurahan Kedungdoro dan 15.079 jiwa dari Kelurahan Tegalsari. Dari hasil ini, persentase penduduk yang sudah melakukan vaksin yaitu 80% untuk Kelurahan Kedungdoro dan 77% untuk Kelurahan Tegalsari. Hasil persentase ini bisa dikatakan baik, karena sudah lebih dari 70% penduduk telah divaksin. Namun meskipun begitu, ketercapaian dalam membentuk imunitas tubuh perlu diperhatikan untuk setiap orangnya. Sehingga masih diperlukan pemahaman untuk masyarakat.

Harapan Puskesmas Kedungdoro dengan adanya kebijakan vaksinasi ini yaitu masyarakat mulai sadar akan pentingnya vaksinasi dan segera melakukan vaksinasi kecuali masyarakat yang memang tidak boleh divaksin. Sejauh ini implementasi vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro memiliki perubahan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kasus kematian pasien covid-19. Berikut tabel kasus pasien meninggal dunia akibat covid-19 di Puskesmas Kedungdoro.

Tabel 4. Data Kasus pasien meninggal karena Covid-19 di Puskesmas Kedungdoro Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Kasus
1.	Januari	5
2.	Februari	3
3.	Maret	3
4.	April	4
5.	Mei	3
6.	Juni	4
7.	Juli	5
8.	Agustus	5
9.	September	0
10.	Oktober	0

Sumber: Puskesmas Kedungdoro

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat kasus kematian akibat covid-19 di Puskesmas Kedungdoro mengalami fluktuasi. Kasus kematian mulai menurun pada bulan Februari dan mulai meningkat pada bulan Juli dan Agustus. Hal ini terjadi karena adanya penyebaran virus gelombang ke-2. Namun, seiring berjalannya waktu masyarakat mulai aktif untuk melakukan vaksinasi covid. Sehingga kasus kematian mulai surut hingga saat ini.

Perubahan lain yang diharapkan oleh Puskesmas Kedungdoro adalah pandemi covid-19

segera berakhir. Hal ini disampaikan oleh Ibu. Nia dalam wawancara bersama peneliti.

“Perubahan yang diinginkan pandemi cepat selesai, mudah-mudahan yang gelombang 3 *hoax* saja dek, karena sebenarnya kita sudah capek, ke-2 saja sudah capek apalagi ke-3, jangan sampai, mudah-mudahan pandemi cepat berakhir” (wawancara pada tanggal 17 November 2021).

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa, tenaga kesehatan Puskesmas Kedungdoro khususnya yang melayani covid-19 baik pasien positif maupun layanan vaksinasi covid-19 berharap kondisi pandemi covid-19 ini segera berakhir. Hal ini dikarenakan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan sudah mulai lelah bertarung dengan virus covid-19 ini.

Dari hasil wawancara dan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan setelah adanya kebijakan vaksinasi. Perubahan itu terlihat dari bertambahnya jumlah masyarakat Puskesmas Kedungdoro yang mau divaksin. Dengan begitu vaksinasi covid-19 mampu untuk merubah kondisi penyebaran wabah virus di lingkungan Puskesmas Kedungdoro dengan menekan angka kematian di Puskesmas Kedungdoro dengan membentuk kekebalan tubuh masyarakatnya.

4) Letak pengambilan keputusan

Indikator letak pengambilan keputusan membahas tentang apakah kebijakan vaksinasi covid-19 ini sudah tepat dalam memecahkan masalah, dan apakah pengambilan keputusan sudah memperhatikan kelompok sasaran/masyarakat. Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro masih mengalami beberapa kendala. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Kepala Puskesmas Kedungdoro bersama dengan staff tenaga kesehatan lainnya saling bekerjasama untuk menemukan jalan keluar masalah. Jika terjadi masalah didalam Puskesmas Kedungdoro maka pengambilan keputusan dilakukan oleh Kepala Puskesmas. Proses pengambilan keputusan mengenai permasalahan pengimplementasian vaksinasi covid-19 diambil dengan cara melakukan rapat bersama. Rapat dihadiri oleh aktor-aktor yang terlibat seperti penanggung jawab program dan tenaga kesehatan yang terlibat. Dengan begitu keputusan yang dibuat akan sesuai dengan penyelesaian masalah.

Pengambilan keputusan dalam hal menentukan sasaran kebijakan, Puskesmas Kedungdoro perpedoman pada Pemerintah dalam

hal ini yaitu Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Sasaran vaksinasi covid-19 dilakukan dengan 3 tahapan dengan memperhatikan *Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE)* serta kajian/rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group*). Pada tahap ke-1 sasaran vaksinasi yaitu kelompok prioritas tenaga Kesehatan dan selingkupnya. Tahapan ke-2 yaitu sasaran kelompok prioritas diantaranya kelompok usia lanjut/lansia (> 60 tahun) dan petugas pelayanan publik. Dan pada tahapan ke-3 sasaran kelompok prioritas yaitu masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, ekonomi yang berusia diatas 18 tahun serta masyarakat lainnya.

Pada awal adanya vaksinasi covid-19 ini, langkah awal Puskesmas Kedungdoro yaitu melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatannya dan kemudian dilanjutkan kepada masyarakat yang rentan tertular seperti lansia, pra-lansia, masyarakat diatas 50 tahun, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), masyarakat umum, dan karena lokasi Puskesmas Kedungdoro berhadapan dengan pedagang UMKM, maka puskesmas Kedungdoro juga melakukan vaksinasi pada para pedagang.

Kepatuhan masyarakat dalam pengimplementasian kebijakan vaksinasi covid-19 masih bisa dikatakan belum baik. Hal ini dikarenakan di Indonesia sendiri analisis sentimen opini masyarakat tentang vaksinasi covid-19 cenderung lebih banyak tanggapan negatif (Harun & Ananda, 2021).

Untuk mengsucceskan jalannya kebijakan vaksinasi covid-19 tentu memerlukan dukungan dari masyarakat, dukungan tersebut berupa kepatuhan masyarakat untuk melakukan vaksinasi covid-19. Kasus penyebaran covid-19 akan terus meningkat jika sikap masyarakat masih lalai dalam menjaga kesehatan dan juga kurangnya tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya vaksinasi (Iqbal & Niswah, 2021).

Akar masalah dari rendahnya minat masyarakat dan keraguan masyarakat untuk melakukan vaksinasi yaitu karena banyaknya berita *hoax* yang bersebaran mengenai pasien meninggal setelah melakukan vaksinasi, pasien terpapar virus setelah vaksinasi, dan sebagainya sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat vaksin covid (Alpito et al., 2021). Dengan begitu diperlukan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi yang mengedukasi dan

mempersuasi masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan bersedia untuk melakukan vaksinasi covid-19 (Dewi, 2021).

Beberapa masyarakat menolak untuk melakukan vaksinasi covid-19 dengan berbagai alasan seperti masih ragu akan keamanan vaksin covid (30%), keraguan akan efektivitasnya (22%), tidak percaya dengan vaksin (13%), takut akan efek samping dari vaksin (12%), dan beberapa memiliki alasan keagamaan (8%) (Dahlan, 2021).

Respon masyarakat Puskesmas Kedunggoro terhadap vaksinasi covid-19 juga dapat dikatakan belum baik. Masyarakat memiliki beberapa alasan untuk menolak vaksinasi covid-19. Alasan yang digunakan yaitu seperti takut jarum suntik, takut akan efek samping vaksinasi, dan memiliki riwayat penyakit komorbid.

Beberapa masyarakat yang memiliki penyakit komorbid, tidak mau melakukan vaksinasi karena tidak adanya biaya/dana untuk melakukan kontrol dengan dokter spesialis. Sehingga mereka masih takut untuk melakukan vaksinasi covid-19 tanpa saran dari dokter spesialis.

Kendala kepatuhan masyarakat juga terjadi pada masyarakat Suku Madura yang tinggal dilingkungan Puskesmas Kedunggoro. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nia selaku tenaga kesehatan puskesmas, beliau mengatakan bahwa masyarakat Madura juga banyak yang menolak untuk divaksin. Mereka juga memiliki alasan yang beragam.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang hingga saat ini belum melakukan vaksinasi covid-19. Salah satunya yaitu Pak. Sunaryo. Berikut hasil wawancaranya.

“Saya rasa vaksin covid-19 tidak menjamin terhindar dari covid-19, dan juga hingga saat ini covid-19 masih ada. Padahal sudah banyak yang divaksin” (wawancara pada tanggal 28 November 2021).

Menurut Pak. Sunaryo dalam wawancara diatas, beliau masih ragu akan keefektifan dan manfaat vaksin covid-19, sehingga beliau tidak ingin melakukan vaksinasi.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan warga yang lain yang juga menolak untuk divaksin. Berikut hasil wawancara Ibu. Ulfa dan peneliti.

“Saya takut jarum suntik. Terus juga takut sama efek dari vaksinasi karena dimedia sosial banyak berita tentang efek vaksin”

(wawancara pada tanggal 28 November 2021).

Dari hasil wawancara diatas, proses vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedunggoro belum mendapatkan respon yang baik dari beberapa masyarakat. Beberapa masyarakat menolak karena memiliki alasan tersendiri seperti ragu akan efektivitas dan dampak/efek samping dari vaksinasi. Namun dalam pelaksanaannya beberapa masyarakat sudah melaksanakan vaksinasi covid-19. Berikut data tabel penduduk Puskesmas Kedunggoro yang belum dan sudah melaksanakan vaksinasi covid-19.

Tabel 5. Data Penduduk Puskesmas Kedunggoro yang Belum dan Sudah divaksin Update 20 November 2021

Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Belum Vaksin	Jumlah Penduduk Sudah Vaksin
Kel. Kedunggoro	22.816 jiwa	3.915 jiwa	15.533 jiwa
Kel. Tegalsari	18.051 jiwa	3.395 jiwa	11.684 jiwa
Total	40.867 jiwa	7.310 jiwa	27.217 jiwa

Sumber: Puskesmas Kedunggoro (Update data 20 November 2021)

Perubahan masyarakat yang mau melakukan vaksin terasa pada saat covid-19 gelombang-2 terjadi, dimana masyarakat mulai mau divaksin. Hal ini terjadi karena pada saat penyebaran covid-19 gelombang 2 kasus pasien positif mulai meningkat. Selain itu, beberapa masyarakat mengatakan alasan lain mereka mau divaksin yaitu karena adanya tuntutan dari pekerjaan mereka. Dan juga beberapa masyarakat mau melakukan vaksinasi karena ingin melakukan perjalanan luar kota dan ingin masuk ke mall. Sehingga hal ini juga berdampak pada peningkatan masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan atas kendala yang terjadi di Puskesmas Kedunggoro dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan melakukan rapat bersama. Sedangkan sasaran kebijakan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedunggoro sudah memperhatikan sasarannya sesuai dengan orang yang rentan tertular. Namun dalam hal ini kendala utama yang dihadapi Puskesmas yaitu kepatuhan masyarakat yang

kurang baik dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 dikarenakan berbagai alasan.

5) Pelaksana program

Keadaan darurat pandemi covid-19 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tata kelola kolaborasi juga penting karena kerja sama dengan masing-masing pemangku kepentingan dapat bersatu dalam sebuah forum, membangun pemahaman, komitmen, dan akuntabilitas untuk segera mengakhiri pandemi (Megawati et al., 2020). Kolaborasi antar pelaksana kebijakan juga dibutuhkan untuk mengatasi penyebaran covid-19. Pelaksana program atau pelaksana kebijakan merupakan alat penggerak untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.

Puskesmas Kedungdoro berperan sebagai tempat atau fasilitas layanan vaksinasi covid-19. Puskesmas Kedungdoro sendiri memiliki tenaga kesehatan yaitu diantaranya 4 dokter umum, 2 dokter gigi, 4 perawat, 1 bidan klinik, 2 bidan desa, 2 bidan umum, 1 apoteker, 1 asisten apoteker, 2 kesehatan masyarakat umum, 1 kesehatan lingkungan, 1 nutrisisionis, 1 analisis kesehatan (ahli teknologi laboratorium medik), dan 14 petugas dukungan manajemen yang terdiri dari pengelola jaringan, juru mudi keamanan, dan sebagainya.

Tenaga kesehatan Puskesmas Kedungdoro yang bertugas untuk memberikan pelayanan vaksinasi covid-19 telah diberikan pelatihan. Dengan adanya pelatihan pada tenaga kesehatan di Puskesmas Kedungdoro, artinya para pemberi layanan vaksinasi memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya. Pelatihan yang diberikan pasca pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilakukan selama 3 hari dengan 2 gelombang. Pada gelombang 1 diikuti oleh 2 tenaga kesehatan, dan gelombang 2 diikuti oleh 3 tenaga kesehatan. Sehingga tenaga kesehatan Puskesmas Kedungdoro yang mengikuti pelatihan berjumlah 5 orang terdiri dari dokter, bidan, dan perawat.

Kader kesehatan Puskesmas Kedungdoro memiliki peran dalam membantu jalannya sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pentingnya vaksinasi covid-19 guna mengatasi permasalahan penyebaran virus covid-19. Sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan berkeliling di lingkungan warga. Tidak hanya itu, kader kesehatan juga memiliki peran dalam membantu Puskesmas Kedungdoro dalam layanan non covid. Anggota kader kesehatan terdiri dari warga-warga. Setiap RT setidaknya memiliki 2 anggota. Namun hal ini juga disesuaikan dengan

jumlah penduduk di tiap RTnya. Semakin banyak jumlah penduduk, maka anggota kader kesehatan di tiap RT juga bertambah. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro juga dibantu oleh pendekar biru. Pendekar biru sebenarnya memiliki peran yang sama dengan kader kesehatan, namun letak perbedaannya yaitu pendekar biru hanya difokuskan kearah pandemi covid-19. Jadi anggota pendekar biru juga mengikuti penyuluhan. Selain itu, pendekar biru juga turut membantu pelaksanaan vaksinasi masal.

Kecamatan dan Kelurahan memiliki peranan yang sama dalam membantu jalannya vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro. Kecamatan dan Kelurahan memiliki data terkait jumlah penduduk yang belum ataupun yang sudah divaksin. Dengan adanya data ini, bisa dijadikan sebagai perbandingan data untuk mengsinkronkan antara data dari puskesmas maupun dari Kecamatan/Kelurahan. Selain itu, tidak lupa dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19, Puskesmas Kedungdoro juga dibantu oleh polisi dan TNI dalam hal penertiban masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan aman.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksana kebijakan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro memiliki peranan yang penting. Pelaksana kebijakan yaitu tenaga kesehatan Puskesmas Kedungdoro sendiri bekerjasama dengan kader kesehatan dan lintas sektor. Lintas sektor terdiri dari Pak. Lurah (pihak kelurahan), Pak. Camat (pihak kecamatan), Polisi, dan tentara. Selain itu Puskesmas Kedungdoro juga bekerjasama dengan Pendekar Biru, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sekitar. RT dan RW membantu Puskesmas dalam proses sinkronisasi data tempat tinggal masyarakat.

6) Sumber daya yang digunakan

Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kedungdoro memiliki sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial atau pendanaan, dan sumber daya perlengkapan atau logistik. Sumber daya yang dibutuhkan oleh Puskesmas Kedungdoro selama pelaksanaan vaksinasi covid-19 sejauh ini tidak memiliki kendala spesifik. Puskesmas Kedungdoro sudah mengatur segala sumber dayanya dengan baik melalui pembuat jadwal tenaga medis dan pembuatan rincian stock vaksinasi.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro yaitu tenaga kesehatan yang berperan dalam memberikan layanan vaksinasi covid-19

seperti menyuntik, dan sebagainya. Dan sumber daya manusia lainnya seperti kader kesehatan Puskesmas Kedungdoro, pihak-pihak lintas sektor, RT & RW, dan pendekar biru berperan dalam menggerakkan masyarakat dalam kegiatan vaksinasi covid-19.

Proses melaksanakan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro memiliki jadwal piket *team*. Hal ini dilakukan untuk membagi antara pemberian layanan kesehatan vaksinasi covid-19 dengan layanan kesehatan umum. Pelaksanaan vaksinasi covid-19, Puskesmas Kedungdoro membuat sebuah jadwal piket untuk tenaga kesehatan yang akan memberikan layanan vaksinasi. Dalam 1 (satu) *team* piket terdiri dari 4 orang, yaitu petugas administrasi, petugas skrining, vaksinator, dan asisten vaksinator. Petugas administrasi bertugas untuk memeriksa pendaftaran atau verifikasi data masyarakat. Petugas skrining bertugas untuk pemberian edukasi dan pemeriksaan fisik sederhana. Disini petugas skrining mengecek kondisi tubuh masyarakat apakah boleh atau tidak melakukan vaksinasi covid-19. Vaksinator bertugas untuk menyuntikkan vaksin kepada masyarakat. Dan untuk asisten vaksinator bertugas untuk menyiapkan cairan vaksin dan mencatat atau menginput data serta memberikan kartu vaksinasi kepada masyarakat. Vaksinator dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 terdiri dari tenaga kesehatan medis-paramedis, perawat, bidan, dokter.

Sumber dana finansial atau sumber daya pendanaan pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro berasal dari APBN (anggaran pendapatan belanja negara), APBD (anggaran pendapatan belanja daerah), dan sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Biaya yang dikeluarkan dalam proses vaksinasi covid-19 yaitu seperti biaya operasional, biaya distribusi logistik, vaksin, dan sebagainya. Namun dalam pengimplementasian kebijakan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro sumber daya finansial tidak diberikan dalam bentuk uang. Seluruh kebutuhan vaksinasi diberikan dalam bentuk logistik. Hal ini juga diucapkan oleh Ibu. Nia selaku tenaga kesehatan di Puskesmas Kedungdoro dalam wawancara bersama peneliti.

“Puskesmas tidak menerima uang untuk vaksinasi. Jadi kita itu mendata kebutuhan untuk vaksinasi sesuai kebutuhan. Sehingga keperluan yang dikirim ke Puskesmas sesuai dengan jumlah sasaran vaksinasi”

(wawancara pada tanggal 2 November 2021).

Sumber daya logistik dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 membutuhkan *safety box*, alat suntik (*auto disable syringe*), alcohol swab, APD level 1 dan sebagainya. Seluruh keperluan logistik ini disediakan oleh Kementerian Kesehatan RI yang kemudian didistribusikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan dilanjutkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan terakhir didistribusikan kepada Puskesmas berdasarkan jumlah sasaran vaksinasi. Setiap puskesmas dan fasilitas vaksinasi lainnya alokasi vaksin dan logistik ditentukan berdasarkan data sasaran yang terverifikasi melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Sehingga, untuk proses pengiriman vaksin dan logistik, Puskesmas membuat jadwal pelayanan vaksinasi seperti hari pelayanan, jumlah sesi layanan per-harinya, jam pelayanan, dan kuota masyarakat yang akan mendapatkan vaksin (Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 2021).

Proses pengelolaan *stock* vaksin dan logistik Puskesmas Kedungdoro memperhitungkan segala keperluan dengan memperhatikan laporan. Puskesmas Kedungdoro menghitung jumlah keperluan vaksinasi dengan jangka waktu 1 minggu. Sehingga 1 minggu sebelum pelaksanaan vaksinasi Puskesmas Kedungdoro sudah memiliki *stock* vaksin.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dibutuhkan dalam pengimplementasian kebijakan vaksinasi covid-19 ini dapat dikatakan sudah tercukupi. Baik itu sumber daya manusianya, sumber daya finansial, dan sumber daya logistik. Segala kebutuhan vaksinasi telah diperhitungkan dan dipersiapkan dengan baik.

B. Context of policy (lingkungan kebijakan)

Dalam mengukur keberhasilan kebijakan terdapat 3 indikator, yaitu:

1) Kekuasaan, kekuatan, dan strategi aktor yang terlibat

Kekuasaan aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 yaitu terletak pada Pemerintah Pusat, yaitu Presiden dan Kementerian Kesehatan RI. Hal ini dikarenakan kebijakan vaksinasi dibuat oleh Presiden dan Menteri Kesehatan RI. Kebijakan yang telah

disahkan kemudian mulai dilaksanakan dengan melakukan koordinasi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang kemudian dilanjutkan secara teknis oleh Puskesmas Kedungdoro. Sehingga dalam hal implementasi kebijakan, Puskesmas Kedungdoro hanya menjalankan kebijakan vaksinasi covid-19 yang telah disusun dan disahkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, Puskesmas Kedungdoro juga memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan pembagungan kesehatan diwilayahnya. Salah satu penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada masa pandemi ini yaitu dengan memberikan perawatan kesehatan dan layanan vaksinasi covid-19 pada masyarakatnya. Untuk memberikan perawatan dan layanan vaksinasi covid-19, Puskesmas Kedungdoro bekerja sama dengan kader kesehatan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, tentara/polisi, dan sebagainya.

Proses pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Kedungdoro dilakukan dengan menyebarkan informasi mengenai waktu, tempat, dan jenis vaksin yang digunakan. Penyebaran informasi ini dilakukan dengan membuat sebuah grup *whatsapp* yang didalamnya beranggotakan tenaga kesehatan puskesmas, RT, RW, kader Kesehatan, dan aktor yang lain. Dengan begitu setiap anggota grup akan membagikan informasi tersebut kemasyarakat. Untuk memperlancar jalannya vaksinasi covid-19, Puskesmas Kedungdoro telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi covid-19, selain itu Puskesmas Kedungdoro juga menjelaskan satu persatu tentang pelaksanaan vaksinasi. Sosialisasi dilakukan sesuai dengan jadwal dari promotor kesehatan. Jadwal telah disesuaikan tiap lokasi antara Kelurahan Kedungdoro dan Kelurahan Tegalsaari. Namun, masih dijumpai beberapa masyarakat yang benar-benar tidak mau divaksin. Dari hasil observasi dilapangan, masyarakat menolak divaksin karena masyarakat memiliki keresahan atas dampak atau efek samping yang dialami setelah vaksin.

Selain itu strategi Puskesmas Kedungdoro untuk memantau masyarakat yaitu membentuk penanggung jawab di tiap RW. Ruang lingkup Puskesmas Kedungdoro sendiri terdiri dari 2 Kelurahan, 14 RW. Penanggung jawab di tiap RW sendiri berjumlah 1-2 tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memantau jumlah masyarakat yang sudah maupun yang belum divaksin. Sehingga setiap penanggung jawab bisa fokus untuk memegang wilayahnya sendiri.

Puskesmas Kedungdoro selalu melayani masyarakat yang ingin divaksin, walaupun dalam satu hari sedikit yang mau divaksin, namun Puskesmas Kedungdoro tetap melayani. Hal ini merupakan strategi dari Puskesmas Kedungdoro agar masyarakat di lingkup Puskesmas Kedungdoro sudah tervaksin semuanya. Segala cara terus dicoba oleh Puskesmas Kedungdoro, namun masih ditemui beberapa masyarakat yang enggan untuk melakukan vaksin. Puskesmas Kedungdoro juga tidak bisa memaksa, karena hal ini juga menjadi hak mereka.

“Strategi lain kita ya itu dek, penyuluhan tidak didengar, *door to door* bersama lintas sektor tadi, kalau masih gak berhasil angkat tangan kita” (wawancara pada tanggal 17 November 2021).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kekuasaan kebijakan vaksinasi terletak pada pemerintah pusat, sedangkan kekuatan dan strategi yang dimiliki oleh Puskesmas Kedungdoro dan aktor yang lainnya bisa dikatakan belum maksimal namun juga bisa dikatakan berhasil. Puskesmas Kedungdoro bersama dengan aktor terlibat telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong masyarakat agar mau melakukan vaksin covid-19. Namun, dalam pelaksanaannya Puskesmas tidak bisa memaksa masyarakat. Sehingga, keputusan untuk melakukan vaksin atau tidak tetap pada kemauan masyarakat sendiri.

2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Pada proses implementasi kebijakan lingkungan karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan. karakter yang baik tentu akan menghasilkan penerapan kebijakan yang baik pula.

Hasil observasi dilapangan menunjukkan Puskesmas Kedungdoro telah melakukan upaya yang baik dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19. Berbagai upaya seperti sosialisasi, *door to door* setidaknya mampu memberikan pandangan dan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi covid-19. Pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro ini dilakukan sesuai dengan standart operasional prosedur yang ada, dimana SOP ini disesuaikan dengan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Selain itu adanya peraturan yang membatasi gerak masyarakat seperti diwajibkan melakukan vaksinasi sebelum melakukan perjalanan dengan transportasi pesawat terbang, kereta api, dan juga

pada saat masuk mall juga mendorong masyarakat untuk segera melaksanakan vaksinasi covid-19.

Pengawasan dan monitoring pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilakukan melalui aplikasi *Pcare* dan *smile*. Aplikasi *Pcare* digunakan untuk melihat data dan jumlah masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi covid-19. Sedangkan aplikasi *smile* digunakan untuk pengawasan dan monitoring jumlah *stock* vaksin covid-19. Dengan adanya aplikasi ini koordinasi dan monitoring antara Pemerintah dan puskesmas dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah juga turut membantu puskesmas dalam memberikan layanan vaksinasi melalui vaksinasi massal. Hal ini tentu berdampak baik bagi Puskesmas dan juga masyarakat. Masyarakat bisa melakukan vaksinasi diluar Puskesmas/ tempat layanan vaksinasi lainnya. Selain itu beban Puskesmas juga berkurang dalam hal memberi layanan vaksinasi, sehingga bisa mengoptimalkan layanan kesehatan lainnya. Pemerintah Kota Surabaya juga turut memberikan layanan vaksinasi massal pada saat mendekati hari Pahlawan. Pemerintah Kota Surabaya membuka hampir 2 bulan layanan vaksinasi covid-19 di Tugu Pahlawan. Selain itu bantuan pelaksanaan vaksinasi juga dilakukan oleh pabrik Wings. Bantuan yang diberikan yaitu setelah masyarakat melakukan vaksinasi, mereka akan mendapatkan minuman dari produk wings.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan rezim yang berkuasa dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 sudah baik. Komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan, pengawasan, dan monitoring antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas berjalan dengan baik. Peran pihak swasta juga sangat membantu dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19.

3) Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana

Proses pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro dilakukan diberbagai lokasi seperti di Balai RW, gedung serbaguna, lapangan sport center milik kelurahan, dan juga di puskesmas. Dalam memberikan layanan vaksinasi, Puskesmas Kedungdoro memiliki *stock* vaksin yang telah disesuaikan dengan jumlah sasaran masyarakat. Namun *stock* vaksin yang diterima tidak langsung diberikan secara bersamaan. *Stock* vaksin didistribusikan secara bertahap. Hal ini menyebabkan pada saat pelaksanaan vaksinasi terjadi kekurangan *stock* vaksin yang berakibat

pada kekecewaan masyarakat karena sudah ikut mengantre.

Antrean mulai banyak terjadi pada saat adanya tekanan yang diberikan oleh pemerintah. Tekanan itu berupa adanya peraturan yang mengharuskan seseorang terdaftar telah melakukan vaksinasi sebelum melakukan aktivitas.

Selain kecewa karena tidak mendapatkan *stock* vaksin, masyarakat juga kecewa karena pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan juga tidak teratur sehingga menyebabkan kerumunan yang dapat memicu pelonjakan kasus pasien positif covid-19. Pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan dirasa kurang persiapan. Kekurangan persiapan ini terletak pada tidak adanya nomor antrean untuk masyarakat yang terlebih dulu datang. Sehingga terjadi kegaduhan kecil untuk mendapatkan posisi pertama dalam antrean.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi vaksinasi yang dilakukan Puskesmas Kedungdoro sudah sesuai dengan petunjuk teknis, namun hanya saja kurangnya persiapan dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan kerumunan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang keberhasilan implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro menurut Grindle yang terdiri dari content of policy dan context of policy dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro sudah berjalan cukup baik walaupun masih ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Kepentingan dari aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan difokuskan untuk memberikan layanan kesehatan vaksinasi covid-19 untuk meningkatkan imunitas pada tubuh manusia. Manfaat yang dirasakan yaitu menurunnya kasus pasien positif covid-19 dilingkungan Puskesmas Kedungdoro. Dengan begitu perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya kebijakan vaksinasi yaitu menurunnya kasus pasien meninggal dunia akibat covid di Puskesmas Kedungdoro.

Pengambilan keputusan atas penyelesaian kendala dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan didasarkan dari hasil rapat. Sedangkan sasaran kebijakan sudah tepat namun kepatuhan sasaran/ masyarakat masih kurang baik karena berbagai alasan. Pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro dibantu oleh beberapa aktor seperti pihak RT/RW,

Kelurahan, Kecamatan, Kader Kesehatan, Pendekar Biru, Polisi, TNI, dan juga pihak swasta.

Sumber daya yang dibutuhkan dalam pengimplementasian kebijakan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro sudah tercukupi mulai dari tenaga kesehatan hingga peralatan logistik. Segala keperluan logistik telah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan didistribusikan ke puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Kekuasaan dari kebijakan vaksinasi covid-19 terletak pada Pemerintah Pusat, yaitu Presiden dan Kementerian Kesehatan selaku pembuat kebijakan. Namun, Puskesmas Kedungdoro tetap memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraa kesehatan diwilayahnya. Untuk mengatasi permasalahan Puskesmas Kedungdoro memiliki strategi yaitu dengan memberikan sosialisasi hingga door to door kerumah warga.

Dalam pengimplementasian kebijakan vaksinasi covid-19 ini, pengawasan dan monitoring dilakukan melalui aplikasi pemerintah yaitu pcare dan smile. Selain itu dukungan yang dilakukan pemerintah untuk membantu jalannya vaksinasi covid-19 yaitu dengan mengadakan vaksinasi massal untuk masyarakat. Vaksinasi yang dilakukan Puskesmas Kedungdoro sudah sesuai dengan petunjuk teknis, namun masih memiliki kekurangan, yaitu dalam proses pelaksanaannya membuat masyarakat kecewa karena kehabisan stock vaksin. Hal ini terjadi karena distribusi vaksin pada puskesmas dilakukan secara bertahap.

Saran

Dari beberapa kendala yang ditemui dalam pengimplementasian kebijakan vaksinasi covid-19 di Puskesmas Kedungdoro, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya yaitu:

1. Masyarakat Indonesia khususnya penduduk Puskesmas Kedungdoro mempelajari dan menyaring segala informasi terkait covid-19 sehingga tidak mudah percaya terhadap berita *hoax*.
2. Pihak Puskesmas melakukan pendekatan mendalam pada masyarakat yang menolak divaksin melalui sosialisasi rutin disertai dengan menjelaskan segala kebijakan pemerintah yang mengatur vaksinasi untuk meyakinkan kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi covid-19.
3. Pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penyebaran berita *hoax* dan juga memberikan klarifikasi tentang kebenaran/kesalahan berita vaksinasi yang beredar.
4. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan/Puskesmas memberikan jaminan kepada masyarakat berupa

perawatan kesehatan jika terjadi efek samping yang berbahaya setelah melakukan vaksinasi.

5. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan bersama pihak Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas memberikan pendampingan khusus bagi pasien komorbid seperti bantuan kontrol kesehatan gratis sebelum melakukan vaksinasi.
6. Puskesmas Kedungdoro perlu mempersiapkan segala kebutuhan seperti nomor atrean dan sebagainya agar tidak terjadi kerumunan pada saat pelaksanaan vaksinasi covid-19.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan artikel ini, diantaranya:

1. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si sebagai dosen pembimbing.
2. Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si dan Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si sebagai dosen penguji.
3. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa.
4. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan.
5. Dr. Dayanti dan Ibu Nia selaku tenaga kesehatan Puskesmas Kedungdoro.
6. Bapak Agus, Bapak Sunaryo, Ibu Ulfa, dan masyarakat yang telah membantu.
7. Teman-teman yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan hiburan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. ALFABETA.
- Alpito, D., Etris, R., Fikri, & Sadiyanti, K. (2021). Respon Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19. *Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 65–69. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/senkim/article/view/7734/3248>
- Astuti, N. P., Nugroho, E., Lattu, J., Potempu, I., & Swandana, D. (2021). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERIMAAN VAKSINASI COVID-19: LITERATURE REVIEW. *Jurnal Keperawatan*, 13.
- Asyafin, M. A., Virdani, D., Kasih, K. D., & Arif, L. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2), 501–510. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18061>
- Dahlan, D. N. (2021). Upaya Petugas Kesehatan Dalam Menumbuhkan Semangat Vaksin Pada Masyarakat (Fenomena Ledakan Minat Vaksin Covid 19) Kota Tulungagung Jawa Timur. *Sultan Idris*

- Journal of Psychology and Education*, xx(Vol 1 No 1 (2021): SJOPE), 70–76.
- Dewi, S. A. E. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. *Health Care: Jurnal Kesehatan*, 10(1), 162–167. <https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.119>
- Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kementerian Kesehatan RI (2021).
- Djayaputra, G. (2021). *Analysis of People ' s Compliance with the Law in the Covid-19 Vaccination Program in Indonesia*. 09(03), 321–337. <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v9i3.11a01>
- Harun, A., & Ananda, D. P. (2021). Analysis of Public Opinion Sentiment About Covid-19 Vaccination in Indonesia Using Naïve Bayes and Decision Tree Analisa Sentimen Opini Publik Tentang Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Menggunakan Naïve Bayes dan Decision Tree. *Indonesia Journal of Machine Learning and Computer Science*, 1(April), 58–63.
- Iqbal, M., & Niswah, F. (2021). TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP VAKSINASI COVID-19 DI KELURAHAN SIDOKLUMPUK KABUPATEN SIDOARJO. *Jurnal Publika*, 9, 601–612.
- Junaedi, D., Arsyad, M. R., Salistia, F., & Romli, M. (2021). *Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia*. 4, 120–143. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i2.558>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi, (2020).
- Megawati, S., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). *Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City*. 473(April), 312–316. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.067>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, (2021). <https://tumj.tums.ac.ir/article-1-11063-fa.html>
- Nugroho, S. A., & Hidayat, I. N. (2021). Efektivitas Dan Keamanan Vaksin Covid-19: Studi Refrensi. *Jurnal Keperawatan Profesional (JKP)*, 9.
- Purba, I. P. M. H., Suwanda, I. M., Adi, A. S., & Wijaya, R. (2021). Policy Synergy between The Provincial Government of East Java and The Central Government on Health Quarantine in The Treatment of Covid-19. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(2), 43. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p43-51>
- Putri, K. E., Wiranti, K., Ziliwu, Y. S., Elvita, M., Y, F. D., S, P. R., Niman, S., & ... (2021). Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi Covid-19. *Jurnal Keperawatan* ..., 9(3), 539–548. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ/article/view/7794>
- Satuan Tugas Penanganan Covid. (2021, January 13). Program Vaksinasi COVID-19 Resmi Dimulai. *Covid19.Go.Id*. <https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/program-vaksinasi-covid-19-resmi-dimulai>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta*.
- Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021, October 21). Pemerintah Terus Cukupi Kebutuhan Vaksin di Dalam Negeri. *Covid19.Go.Id*. <https://covid19.go.id/berita/pemerintah-terus-cukupi-kebutuhan-vaksin-di-dalam-negeri>
- Unicef. (2021). *Hal-hal Penting Seputar Vaksin COVID-19*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/hal-hal-penting-seputar-vaksin-covid-19>

